

Transformasi Digital Pemerintahan Desa: Sosialisasi dan Pelatihan Sistem Informasi Desa Bongopini

Nikmasari Pakaya^{a*}, Muchlis Polin^b, Alfian Zakaria^c

^{a,b,c}Program Studi Sistem Informasi, Universitas Negeri Gorontalo

nikmasari.pakaya@ung.ac.id^a, mpolin@ung.ac.id^b, alfian.zakaria@ung.ac.id^c

Abstract

Digitalization has become a strategic necessity that must be adopted to address increasingly complex and dynamic global challenges. Today, digital technology serves as a key instrument in shaping governance and delivering public services, including at the village government level throughout Indonesia. Bongopini Village, located in Bone Bolango Regency, is one such village that has not yet utilized information and communication technology (ICT) for public services and information dissemination. The lack of optimal administrative services has led some residents to view village administrative processes as unimportant, which in turn hampers the updating of population data and other official documents. To address this issue, a Village Information System (Sistem Informasi Desa or SID) was developed to support the digital transformation of public service delivery in Bongopini Village. The initiative was carried out in several stages: system development, socialization, training, and evaluation. The SID application was introduced and delivered through training sessions aimed at the Bongopini Village officials as working partners. The implementation of the Village Information System has had a positive impact on improving the capacity of village officials in managing digital-based administrative services.

Keywords: Digital Transformation; Public Service; Village Information System

Abstrak

Digitalisasi menjadi kebutuhan strategis yang harus diadopsi untuk menghadapi tantangan global yang kian kompleks dan dinamis. Saat ini, teknologi digital dijadikan instrumen utama dalam menciptakan tata kelola pemerintahan dan layanan publik di tingkat pemerintah desa di seluruh Indonesia. Desa Bongopini merupakan salah satu desa di Kabupaten Bone Bolango yang belum memanfaatkan TIK dalam pelayanan publik dan penyampaian informasi. Kurang optimalnya pelayanan administrasi mengakibatkan sebagian masyarakat masih menganggap pengurusan administrasi desa sebagai sesuatu yang tidak penting sehingga menghambat pemutakhiran data kependudukan atau dokumen resmi lainnya. Untuk mengatasi masalah tersebut dikembangkan Sistem Informasi Desa untuk mendukung transformasi digital dalam pelayanan publik di Desa Bongopini. Kegiatan dilaksanakan dengan tahapan pengembangan sistem, sosialisasi, pelatihan, dan evaluasi. SID yang dikembangkan akan disosialisasikan dilakukan pelatihan mengenai penggunaan aplikasi Sistem Informasi Desa kepada Aparat Desa Bongopini sebagai mitra kerja. Hasil kegiatan Transformasi Digital Sistem Informasi Desa (SID) yang telah dilaksanakan memberikan manfaat positif terhadap peningkatan kapasitas aparatur desa dalam pengelolaan administrasi berbasis digital..

Kata Kunci: Transformasi Digital; Pelayanan Publik; Sistem Informasi Desa

1. Pendahuluan

Perkembangan digitalisasi yang sangat pesat dewasa ini telah memberikan pengaruh besar terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam kegiatan pembangunan di Indonesia (Mayyora, et.al, 2025). Digitalisasi menjadi kebutuhan strategis yang harus

diadopsi untuk menghadapi tantangan global yang kian kompleks dan dinamis. Komitmen negara dalam mendukung percepatan transformasi digital secara menyeluruh ditegaskan melalui diterbitkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional. Kebijakan ini menjadi pijakan penting dalam memperkuat arah pembangunan nasional berbasis teknologi informasi. Peraturan tersebut memuat empat poin strategis yang mencerminkan keseriusan pemerintah dalam membangun ekosistem digital nasional yang terintegrasi, yaitu percepatan transformasi digital, keterpaduan layanan digital nasional, pengembangan sumber daya manusia (SDM) digital, dan penguatan keamanan siber. Keempat aspek ini saling terkait dan menjadi fondasi utama dalam mewujudkan pelayanan publik yang lebih efisien, inklusif, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan adanya regulasi ini, teknologi digital dijadikan instrumen utama dalam menciptakan tata kelola pemerintahan dan layanan publik di tingkat pemerintah desa di seluruh Indonesia (Mayasari, et. Al, 2022). Akan tetapi, masih terdapat banyak lembaga pemerintahan yang menggunakan metode pengarsipan tradisional, yang seringkali kurang efisien dan mudah menghadapi berbagai masalah operasional

Desa Bongopini adalah salah satu desa di Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo. Sebelum berdiri sendiri, Desa Bongopini dulunya merupakan bagian dari wilayah Desa Bongoime. Pada tahun 1994 Desa Bongopini terbentuk setelah memisahkan diri dari Desa Bongoime. Berdasarkan studi awal, diketahui bahwa Desa Bongopini saat ini belum menerapkan perkembangan teknologi dalam penyampaian informasi, sehingga penyebaran informasi bersifat manual. Sulitnya melakukan penyebaran informasi terkait perkembangan kondisi desa, hingga penyebaran informasi terkait kegiatan kepemudaan dan kegiatan sosial yang ada di Desa Bongopini, menjadi kendala bagi mitra untuk mengefisiensi kinerja. Tata kelola pemerintahan yang baik ditopang oleh sistem administrasi dan manajemen modern, termasuk pengelolaan arsip yang memiliki peran strategis (Astuti, 2023). Permasalahan utama yang dihadapi pemerintah desa Bongopini adalah pada pelayanan dan penyebaran informasi pada publik.

Kualitas pelayanan publik merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan pembangunan di tingkat desa (Putri dan Utama, 2024). Terkait dengan pelayanan publik, kurangnya dokumentasi, arsip yang tidak terorganisir, serta tidak adanya sistem kerja yang baku menyebabkan pelayanan tidak efisien dan menyulitkan pelacakan data jika diperlukan. Beberapa aparat desa masih belum memahami aturan hukum dan kebijakan terbaru yang berkaitan dengan pelayanan administrasi, sehingga pelayanan bisa tidak sesuai prosedur atau bahkan menyalahi aturan. Terbatasnya jumlah perangkat desa juga menjadi salah satu penyebab lambatnya pelayanan administrasi dan penyebaran informasi publik bagi masyarakat luas. Masyarakat sulit untuk mengakses informasi dari desa ataupun informasi terkait kegiatan kepemudaan mitra.

Untuk mengatasi masalah tersebut, dikembangkan Sistem Informasi Desa untuk mendukung transformasi digital dalam pelayanan publik di Desa Bongopini Kabupaten Bone Bolango. Tata kelola yang baik menjadi fondasi utama dalam mewujudkan pemerintahan desa yang efektif dan responsif terhadap kebutuhan warganya (Hajar, et. Al., 2021). Sistem yang dikembangkan ditindaklanjuti dengan sosialisasi dan pelatihan penggunaan aplikasi Sistem Informasi Desa kepada Aparat Desa Bongopini sebagai

mitra kerja. Fitur yang dikembangkan pada sistem ini berfokus pada penyediaan layanan administrasi surat-menyurat secara online, layanan tanggapan berupa respon, kritik, atau aspirasi kepada aparat desa, serta distribusi informasi desa melalui sistem informasi desa.

Kegiatan ataupun proses yang dilakukan oleh pemerintah dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), seperti internet, perangkat lunak, dan sistem digital lainnya dapat meningkatkan pelayanan publik dan proses administrasi pemerintahan menjadi lebih cepat dan hemat biaya, memastikan bahwa pelayanan yang diberikan tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, memperkuat transparansi sehingga masyarakat dapat mengakses informasi secara terbuka serta kinerja pemerintah dapat lebih mudah dipantau, diukur, dan dipertanggungjawabkan kepada publik (Pertiwi, et. Al, 2021). Transformasi digital pada pemerintahan desa dilaksanakan dengan tujuan mengaplikasikan keahlian akademik khususnya pengembangan sistem dan transformasi digital untuk menyelesaikan permasalahan masyarakat di bidang teknologi informasi dan komunikasi. Kegiatan sosialisasi dan pelatihan bertujuan meningkatkan pengetahuan, kapasitas, dan keterampilan masyarakat melalui sosialisasi dan pelatihan. Pengabdian kepada Masyarakat juga dimaksudkan untuk menjalin kemitraan antara institusi akademik dengan pemerintah untuk menciptakan dampak yang berkelanjutan.

Penerapan *e-government* berperan sebagai sarana peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi digital. Dengan dukungan kondisi desa yang telah memiliki akses internet yang memadai dan terjangkau oleh jaringan seluler, sangat memungkinkan pengembangan sistem informasi desa bagi pemerintah Desa Bongopini. Solusi, target dan indikator yang ditawarkan melalui kegiatan pengabdian ini yang disajikan pada Tabel 1, antara lain:

Tabel 1 Solusi yang ditawarkan, target dan indikator

No	Solusi	Target	Indikator
1	Mengembangkan Sistem Informasi Desa Bongopini	Produk Aplikasi: Sistem Informasi Desa	Aplikasi telah berfungsi penuh, sistem berhasil di- <i>deploy</i> dan bisa diakses
2	Melakukan sosialisasi tentang pentingnya SID dalam transparansi informasi desa di Desa Bongopini.	Peningkatan pengetahuan masyarakat	Masyarakat memahami pentingnya SID dan mengetahui prosedur layanan publik digital
3	Melatih aparat desa dan masyarakat dalam menggunakan SID Desa Bongopini	Tersedianya sumber daya manusia yang terlatih	Masyarakat dan aparat desa mampu mengoperasikan SID secara mandiri

2. Metode Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan pengabdian yang akan dilaksanakan terdiri dari beberapa tahapan seperti yang diuraikan pada Tabel 2 berikut:

Tabel 2 Tahapan Pelaksanaan

No	Tahapan	Uraian
1	Pengumpulan Data	• Wawancara dengan aparat masyarakat desa • Pengamatan terhadap proses pengelolaan data di kantor desa dan fasilitas internet desa • Studi dokumentasi
2	Analisis dan Desain Sistem	• Analisis kebutuhan sistem yang dikembangkan • Desain sistem
3	Sosialisasi	• Penetapan waktu pelaksanaan • Penyiapan materi sosialisasi pentingnya transformasi dan pelayanan publik digital
4	Pelatihan	• Penetapan waktu pelaksanaan • Penyiapan materi pelatihan sistem informasi desa • Koordinasi kesiapan sarana dan prasarana
5	Evaluasi	Menilai pemahaman melalui tanya jawab dan wawancara langsung terhadap peserta kegiatan
6	Pelaporan	Penyusunan laporan kegiatan pengabdian

Kegiatan pengabdian akan dilaksanakan oleh tim pengabdian yang terdiri dari ketua dan anggota tim serta berkolaborasi dengan mahasiswa Program Studi Sistem Informasi Universitas Negeri Gorontalo.

3. Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan hasil observasi yang dilaksanakan, dirancang Sistem Informasi Desa untuk diterapkan serta akan dilakukan pelatihan mengenai penggunaan aplikasi Sistem Informasi Desa kepada Aparat Desa Bongopini sebagai mitra kerja. Sistem Informasi Desa merupakan kumpulan proses yang melibatkan berbagai komponen, baik struktur dan infrastruktur, perangkat keras dan lunak, maupun sumber daya alam dan manusia, yang bekerja sesuai perannya masing-masing. Tujuannya adalah mewujudkan pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, mudah diakses, dan partisipatif. Kehadiran Sistem Informasi Desa menjadi landasan bagi terciptanya tata kelola pemerintahan desa yang baik dan bersih demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa (Shomad, 2018).

Setelah permasalahan berhasil diidentifikasi, ditentukan kebutuhan atau melakukan analisis terhadap kebutuhan yang ada (Melinda, dkk, 2018). Analisis kebutuhan bertujuan untuk merumuskan solusi atas permasalahan yang ada dengan menguraikan detail fitur-fitur yang akan dikembangkan dalam sistem, serta menentukan perangkat yang diperlukan untuk proses pengembangan dan operasional sistem (Widyastuti, dkk, 2024). Setelah dilakukan analisis kebutuhan sistem, ditentukan beberapa fitur untuk Sistem Informasi Desa yang dikembangkan, antara lain:

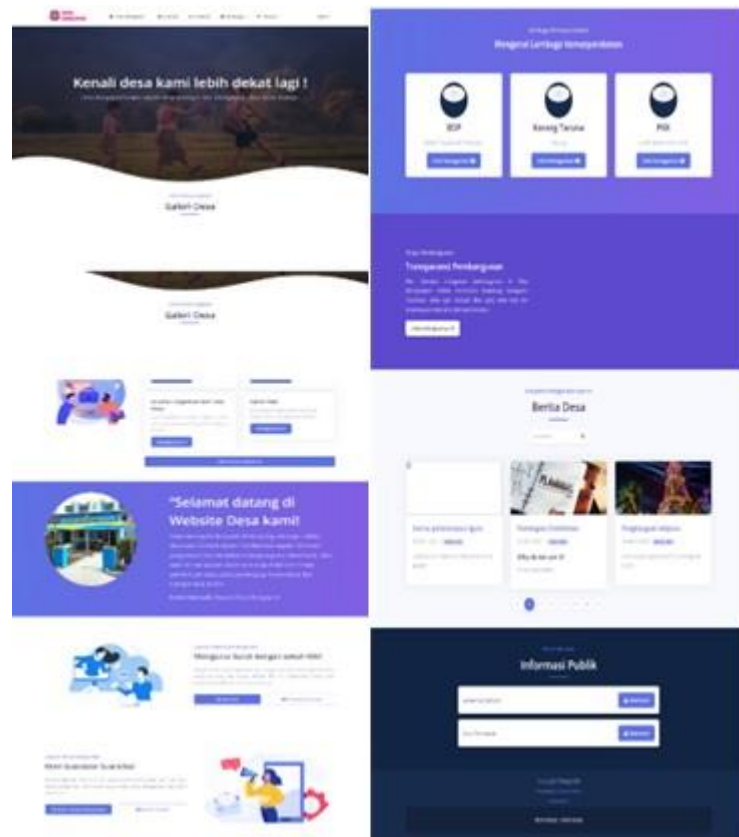
1. Masyarakat bisa mengajukan surat dari rumah untuk mengatasi antrian dan untuk mengatur manajemen administrasi.
2. Masyarakat bisa memberikan tanggapan berupa *respon*, kritik, atau aspirasi kepada aparat desa.
3. Masyarakat bisa mendapatkan informasi lebih cepat melalui SID

Tabel 1 menyajikan informasi entitas pengguna sistem, data input, dan output yang dihasilkan oleh sistem. Saat pertama kali dikunjungi, Website Sistem Informasi Desa menampilkan halaman awal yang berisi identitas desa, galeri dokumentasi dari kegiatan desa, layanan yang terdapat di Sistem Informasi Desa, Lembaga Kemasyarakatan, berita desa dan informasi publik.

Tabel 3. Identifikasi External Entity

<i>External Entity</i>	<i>Input</i>	<i>Output</i>
Admin Layanan	Data Pegawai	Daftar pegawai
	Data Penduduk	Daftar penduduk
	Berita	Daftar berita
	Surat	Daftar surat
	Profil Desa	Tampilan Profil Desa
	Dokumentasi	Tampilan
	Respon Penduduk	Dokumentasi Daftar Respon Penduduk
Admin Berita	Berita	Tampilan Berita
Masyarakat	Respon	Token Surat
	Surat	Jawaban Respon

Tahap perancangan dilakukan setelah seluruh data hasil observasi berhasil dianalisis secara menyeluruh (Yusron dan Huda, 2021). Pada tahap ini, perancangan sistem disusun berdasarkan hasil analisis kebutuhan yang telah diperoleh Berdasarkan rancangan sistem, dikembangkan SID Desa Bongopini yang berbasis web. Fitur-fitur yang dikembangkan disesuaikan dengan hasil analisis kebutuhan sistem, dengan menggunakan teknologi berbasis web. Web adalah sekumpulan domain yang berisi informasi di internet dan diakses melalui browser menggunakan URL. Web berfungsi sebagai sarana penyedia informasi, media untuk perdagangan daring, serta platform untuk membuat blog. Terdapat beberapa jenis website, antara lain website dinamis, interaktif, dan statis. Komponen utama dari sebuah situs web meliputi konten, hosting, dan domain (Widiastuti, 2022). Pengembangan SID dilakukan sebisa mungkin dapat memenuhi standar ekspektasi masyarakat terhadap website ini dengan menyediakan beberapa kelengkapan tampilan seperti pada Gambar 1.

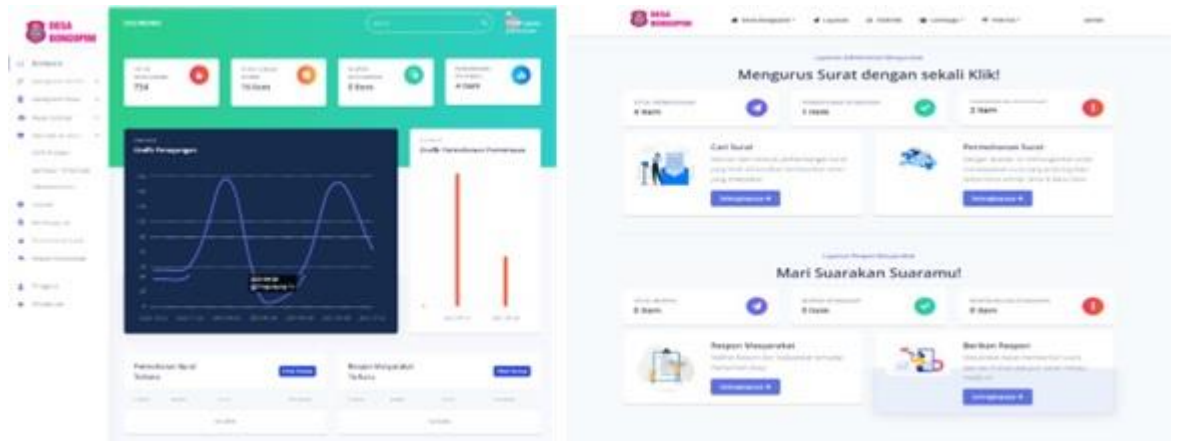


Gambar 1. Tampilan Awal Sistem Informasi Desa Bongopini

Aparat desa dapat melakukan penyesuaian terhadap informasi desa yang ditampilkan di Sistem Informasi Desa dengan melakukan *login* terlebih dahulu untuk dapat masuk ke halaman *dashboard*. Untuk dapat *login* di website ini, pegawai sebelumnya harus mendaftarkan diri terlebih dahulu dan diverifikasi oleh admin. Selain itu, pegawai juga dapat ditambahkan langsung di halaman 'Pengguna'. Tampilan sistem disajikan pada Gambar 2. Beberapa fitur yang dapat dimanfaatkan oleh aparat desa agar informasi desa dapat disesuaikan sesuai dengan informasi desa tersebut, antara lain:

- Tampilan total keseluruhan data-data dalam bentuk angka dan grafik.
- Manajemen Artikel untuk membuat, memperbarui, dan juga menghapus artikel, manajemen kategori dan manajemen komentar (verifikasi dan melihat komentar).
- Terdapat beberapa menu pilihan yaitu Identitas Desa, Potensi Desa, Sambutan Kepala Desa, dan Dokumentasi. Pada bagian ini berfokus pada bagian yang ditampilkan pada halaman awal.
- Terdapat beberapa menu pilihan yaitu Data Penduduk dan Data Keluarga. Data Penduduk berisi seluruh data penduduk yang dapat ditambahkan secara manual dan juga bisa ditambahkan dengan cara impor. Sedangkan data keluarga merupakan data penduduk yang di grup berdasarkan NKK yang sama.
- Halaman Administrasi Desa khusus untuk pengguna internal pemerintah desa, termasuk Struktur Organisasi, Lembaga Kemasyarakatan, dan Informasi publik.
- Tampilan statistik yang dapat dikustomisasi sesuai kondisi *real*. Terdapat pilihan data jika ditampilkan atau tidak dan juga pegawai dapat menginputkan jumlah ataupun nama label dari statistik.

- Terdapat data pembangunan yang ada di desa sebagai transparansi aparat desa kepada masyarakat untuk dapat melihat segala bentuk pembangunan yang ada di desa.
- Tampilan semua data permohonan surat yang telah diajukan oleh penduduk dan juga dapat mencetak/*print* yang telah ditindak lanjuti.
- Respon masyarakat dan tanggapan balik dari pemerintah desa.



Gambar 2. Tampilan Dashboard Sistem Informasi Desa Bongopini

Pengembangan sistem diselesaikan sesuai waktu yang dijadwalkan dan siap untuk disosialisasikan kepada mitra. Melihat manfaat yang ditawarkan oleh Sistem Informasi Desa Berbasis Web sebagai aplikasi untuk mengelola data desa, maka diperlukan sosialisasi guna meningkatkan pemahaman tentang pentingnya sistem ini dalam mendukung pengelolaan data yang lebih baik (Wulandari, dkk, 2021). Sosialisasi dilaksanakan sesuai waktu yang disepakati bersama mitra dan dilanjutkan dengan pelatihan yang dihadiri oleh pemangku kepentingan sekaligus pengguna sistem. Dibutuhkan pelatihan secara rutin bagi aparat desa serta evaluasi terus-menerus terhadap penerapan prinsip *good governance* agar pelayanan administrasi desa menjadi lebih responsif dan efisien (Nasir, 2025). Peserta kegiatan terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa Bongopini, Admin Sistem Informasi Desa, Perwakilan BPD, Kepala-kepala Dusun, Karang Taruna, dan perwakilan masyarakat dengan total peserta 25 orang. Sosialisasi dan Pelatihan dilaksanakan di hari yang sama dengan cakupan materi di antaranya Pengenalan Sistem Informasi Desa (SID), Manajemen Data Kependudukan dan Administrasi Surat, Pelaporan dan Dokumentasi Digital, dan cara penggunaan Sistem Informasi Desa Bongopini.

Kegiatan Sosialisasi dan Pelatihan menghasilkan *outcome* peningkatan kapasitas SDM Desa dengan tersedianya admin di desa yang mampu mengoperasikan SID, dan inisiasi dari karang taruna untuk membentuk tim pengelola data digital desa. Selain itu, data kependudukan dan pelayanan administrasi surat yang terdigitalisasi dalam SID mendukung ketersediaan data desa yang terpadu dan akurat. Secara keseluruhan, Pelatihan Sistem Informasi Desa (SID) yang dilaksanakan di Desa Bongopini pada tanggal 6 Agustus 2025 telah berjalan dengan baik dan mencapai beberapa hasil yang signifikan, baik dari sisi peningkatan kapasitas SDM maupun kesiapan teknis implementasi sistem digital desa.



Gambar 3. Sosialisasi dan Pelatihan SID

Berdasarkan evaluasi melalui diskusi terbuka dengan seluruh peserta, diketahui bahwa peserta pelatihan, khususnya admin telah memahami dasar-dasar penggunaan SID. Admin mampu melakukan input data kependudukan, membuat surat keterangan secara digital, dan mengelola profil desa secara mandiri. Dalam pengelolaan SID, telah disepakati tim khusus yang akan bertanggung jawab atas pengelolaan dan pemutakhiran data dalam SID. Tim ini terdiri dari operator desa, sekretaris desa, dan satu orang dari perangkat teknis, dan dibantu oleh karang taruna secara sukarela. Selama sesi pelatihan, peserta berhasil mengunggah data awal seperti Data penduduk dan Data kepala keluarga. Peserta juga mampu melakukan simulasi pembuatan surat pengantar, surat keterangan domisili, dan surat keterangan usaha melalui SID. Hasilnya menunjukkan bahwa sistem ini dapat mempercepat dan merapikan administrasi desa. Dalam upaya pemberdayaan, kerja sama antara pemerintah, institusi pendidikan, dan organisasi masyarakat sipil memegang peranan penting. Keterlibatan berbagai pihak dapat membantu membentuk lingkungan yang mendukung peningkatan kapasitas aparat desa. Pemerintah daerah dapat mengambil peran sebagai fasilitator dengan menyediakan pelatihan serta sumber daya yang diperlukan (Rusli, dkk, 2024). Dengan demikian, akan sangat memungkinkan terciptanya pemerintahan desa yang lebih baik dan transparan yang dapat direalisasikan melalui pemberdayaan yang tepat dan pemanfaatan teknologi informasi secara optimal.

4. Kesimpulan

Transformasi digital melalui sosialisasi dan pelatihan Sistem Informasi Desa (SID) yang telah dilaksanakan di Desa Bongopini memberikan dampak positif terhadap peningkatan kapasitas aparatur desa dalam pengelolaan administrasi berbasis digital. Kegiatan ini berjalan dengan lancar, partisipatif, dan mencapai sebagian besar tujuan yang telah ditetapkan. Beberapa kesimpulan yang dapat diambil dari pelatihan ini antara lain:

1. Aparatur desa telah memahami dasar-dasar penggunaan SID, termasuk penginputan data, pelayanan surat, dan pengelolaan profil desa secara digital.
2. Pelatihan berhasil meningkatkan keterampilan teknis operator desa dan perangkat lainnya dalam menggunakan aplikasi SID sebagai alat bantu dalam pelayanan dan tata kelola desa.
3. Terbentuknya tim pengelola SID di tingkat desa menjadi langkah awal yang baik untuk memastikan implementasi sistem ini berjalan berkelanjutan.

4. Data dasar desa mulai terintegrasi dalam sistem digital, yang akan memudahkan perencanaan pembangunan, pelayanan masyarakat, dan pelaporan kepada instansi terkait.
5. Kesadaran akan pentingnya sistem informasi yang terpusat dan akurat telah tumbuh, mendorong desa untuk lebih siap menuju transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan.
6. Meskipun masih terdapat beberapa kendala teknis seperti keterbatasan perangkat dan koneksi internet, antusiasme peserta menunjukkan kesiapan desa untuk terus belajar dan berkembang.

Daftar Pustaka

- Astuti, I., & Uik, A. (2023). Model Tata Kelola Kearsipan Dalam Mewujudkan Good Governance (Studi Kasus Pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan)= Archives Governance Model In Realizing Good Governance (Case Study At The Regional Office Of The Ministry Of Religion South At The Regional Office Of The Ministry Of Religion South Sulawesi Province (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin).
- Hajar, S., Ali, K., Saputra, A., Hajar, S., Ali, K., & Saputra, A. (2021). Optimalisasi Pelayanan Publik dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa di Desa Pematang Johar. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummanioramania*, 6(1), 136-142.
- Mayasari, R., Febriantoko, J., Putra, R. R., Hadiwijaya, H., & Kurniawan, D (2022). Digitalisasi Desa: Pilar Pembangunan Ekonomi Desa. Penerbit Nem.
- Mayyora, R., Sholihah, Q., Wanumawatie, I., & Wanto, A. H. (2025). Transformasi Digital Desa dan Implikasinya Terhadap Pembangunan Berkelanjutan: Pendekatan Literature Review. *Indonesian Journal of Intellectual Publication*, 5(2), 100-111.
- Melinda, M., Borman, R. I., & Susanto, E. R. (2018). Rancang Bangun Sistem Informasi Publik Berbasis Web (Studi Kasus: Desa Durian Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran). *Jurnal Tekno Kompak*, 11(1), 1-4.
- Nasir, M. (2025). Implementasi Good Governance dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Desa. *PAMARENDA: Public Administration and Government Journal*, 4(3), 468-478.
- Pertiwi, A., Dema, H., Mustanir, A., & Anugrah, E. (2021). Penerapan E-Government Dalam Mewujudkan Transparansi Tata Kelola Pemerintahan Desa (Studi Pada Pemerintahan Desa Bulu Timoreng). *PRAJA: Jurnal Ilmiah Pemerintahan*, 9(3), 130-139.
- Putri, A. S., & Utama, L. S. (2024). Strategi Peningkatan Kedisiplinan Aparat Desa Dalam Meningkatkan Mutu Pelayanan. *Jurnal Perlindungan Masyarakat: Bestuur Praesidium*, 1(2), 24-35.
- Qolby, A. N., & Taufik, Y. (2025). Analisis Implementasi Arsip Digital Dokumen Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung. *Aplikasi Administrasi: Media Analisa Masalah Administrasi*, 59-70.
- Rusli, R., Ahmar, A. S., Musa, H., Rahman, A., & Saputra, A. (2024). Pemberdayaan Aparat Desa Palakka melalui Pelatihan Penggunaan Sistem Informasi Administrasi Desa. *Panrannuangku Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(3), 67-71.
- Shomad, A. (2018). Implementasi sistem informasi desa di Kabupaten Bekasi. *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik*, 8(2), 62-80.
- Widiastuti, I. (2022). Sistem Informasi Pelayanan Desa Berbasis Web di Desa Wanajaya Jawa Barat. *DIKMAS: Jurnal Pendidikan Masyarakat Dan Pengabdian*, 2(3), 877-886.
- Widyastuti, Y. M., Oktiarso, T., & kartika Putrianto, N. (2024). Perencanaan Dan Analisis Kebutuhan Pengguna Dalam Pengembangan Sistem Informasi Hubungan Pelanggan. *KURAWAL: Jurnal Teknologi, Informasi dan Industri*, 7(1), 1-11.
- Wulandari, H., Suherman, S., & Razali, R. (2021). Sosialisasi sistem informasi berbasis web dalam meningkatkan pengelolaan data akademik sekolah menengah kejuruan madani marendal i. *RESWARA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2), 313-317.
- Yusron, R. D. R., & Huda, M. M. (2021). Analisis Perancangan Sistem Informasi Perpustakaan Menggunakan Model Waterfall Dalam Peningkatan Inovasi Teknologi. *Journal Automation Computer Information System*, 1(1), 26-36.